

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG  
MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOBA**

Putusan No. 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ARI WAHYUDI ACHMAD**

**NIM: 10500113175**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**


## PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji Penulisan skripsi saudara **ARI WAHYUDI ACHMAD** NIM **10500113175** Mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Senin, 5 Juni 2017

Penguji I

  
**Dr. Marilang, M.Hum**  
NIP.19621231 199313 1 024

Penguji II

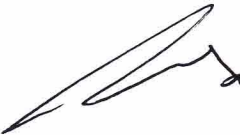
  
**Dr. M. Tahir Maloko, M.Hi**  
NIP.19631231 199503 1 006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

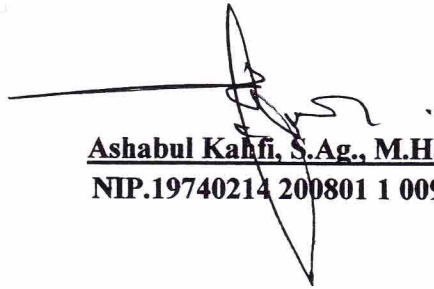
**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

Pembimbing I

  
**Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**  
NIP.19610404 199303 1 005

Pembimbing II

  
**Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H.**  
NIP.19740214 200801 1 009

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba (Studi Putusan 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks)”, yang disusun oleh saudara Ari Wahyudi Achmad, NIM: 10500113175, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

Samata,

Agustus 2017

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, SH.,MH	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Marilang, M. Hum	(.....)
Munnaqisy II	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Ahkam Jayadi, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seseorang hamba selain puji syukur kehadiran Allah swt. Tuhan yang maha mengetahui, pemilik segala ilmu, karena atas petunjuk-Nya beserta segala nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul: **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOBA** dapat diselesaikan. Adapun skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kompleksitas dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah menjadi obstruksi, oleh karena hadirnya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala rasa hormat, disampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Ayahanda Achmad Mucharom dan Ibunda Syamsuna atas segala cinta, dukungan, doa yang senantiasa mengiri setiap langkah hingga penulisan skripsi ini selesai, tenaga, finansial, dan bimbingan yang diberikan.
2. Bapak Prof Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Istiqamah S.H., M.H Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H., M.H Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Bapak Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H., atas arahan dan petunjuk yang diberikan sebagai pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini. dan beserta penguji Bapak Dr. Marilang, M.Hum dan Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi yang juga memberikan arahan dan



petunjuk dalam menyelesaikan skripsi tersebut.

6. Bapak dan Ibu dosen pada jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar atas teladan dan konduksi edukasi yang diberikan selama proses menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Pengadilan Negeri Makassar dan seluruh staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman kelas Ilmu Hukum D yang telah mengajarkan penulis memahami hakikat menjadi mahasiswa selama menjalani bangku perkuliahan.
9. Teman-teman KKN Reguler Tahun 2016 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa atas kekeluargaan dan kebersamaannya selama menjalani Kuliah Kerja Nyata.
10. Seluruh pihak yang sedikit berkontribusi atas penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu. Tidak disebutkan bukan berarti mengurangi esensi kalian.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh halayak umum. Semoga Allah swt, selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan semoga Allah swt. Akan menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal ibadah yang berkelanjutan di sisi-Nya. Amin.

Makassar, 30 Mei 2017

ARI WAHYUDI ACHMAD  
NIM: 10500113175

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	3
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	9
A. Tinjauan Mengenai Hukuman Pidana Anak .....	9
1. Sejarah Hukum Pidana Anak .....	9
B. Tinjauan Mengenai Hukum Materil dan Formil .....	11
1. Pengertian Hukum Materil Dan Hukum Formil .....	11
2. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil Dan Formil ...	12
C. Penerapan Sistim Pidana Anak di Pengadilan (UU No 3	
tahun 1997 tentang sistim peradilan Anak) .....	14
D. Tinjauan Mengenai Anak .....	17
1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang .....	17
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam .....	19
E. Tinjauan Mengenai Narkoba (UU No 35 tahun 2009 tentang	
narkotika) .....	23
1. Pegertian Narkoba .....	23
2. Pengertian Zat Narkoba .....	25
3. Dampak Atau Bahaya Narkoba .....	25

4. Manfaat Narkoba Dalam Keadaan Darurat.....	26
5. Dalil Tentang Narkoba.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	30
D. Metode Pengumpulan Data .....	30
E. Instrumen Penelitian .....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar .....	33
B. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil Dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks .....	34
C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar .....	37
D. Pembahasan Unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	40
E. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Formil Dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks .....	44
F. Analisis Putusan .....	47
G. Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Makassar .....	48
H. Analisis Yuridis .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Implikasi.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYATHIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerapan Hukum di Indonesia jauh dari kata tujuan dan unsur-unsur pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam arti sebagai pengedar dan pengonsumsi narkoba. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kedalam kualifikasi sebagai korban kejahatan adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban kejahatan itu adalah pelaku sendiri. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa

deskriminasi.<sup>1</sup>

Untuk usia anak yang terlibat narkoba sangat bervariasi, bahkan saat ini anak Sekolah Dasar yang banyak di tangani oleh para penegak hukum. Ini karena Penyebaran narkoba semakin mudah karena anak Sekolah Dasar juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang pengedar narkoba.<sup>2</sup> Menyisipkan zat-zat adiktif “zat yang menyebabkan efek kecanduan” kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan pengenalan dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan

Ditandai dengan banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditahan di lembaga kepemasyarakatan, baik itu yang bersangkutan berprofesi sebagai pelaku pengedar atau sebagai pemakai obat-obatan berbahaya tersebut. Upaya pemerintah dengan berlakunya merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan ancaman seberat-beratnya bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-obatan berbahaya, dan narkoba dapat di harapkan dapat memperbaiki meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ke depan di harapkan pemerintah

---

<sup>1</sup><http://kurniawanlawfirm.blogspot.co.id/2012/02/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-anak>. (di akses 15, Juli 2016, 14 :05 WITA ).

<sup>2</sup><http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/28/325186/jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen> (diakses 15 juli 2016- 18 : 05 WITA )

melakukan upaya preventif maupun preentif di masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan berbahaya atau narkoba, demi menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat generasi muda yang banyak beserta anak-anak yang banyak melakukan penyalahgunaan narkoba beserta obat-obatan yang berbahaya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba.**

## **B. Deskripsi Fokus**

Untuk menghindari implemmentasi atau penafsiran yang keliru oleh pembaca, maka penyusun menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

### **1. Pengertian penerapan hukum**

Penerapan Hukum adalah aturan yang sangat resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat di artikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asas manusia. dan secara umum fungsi hukum juga untuk menertibkan

---

<sup>3</sup>Skripsi M. Alatas “*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”( studi kasus putusan No : 159/pid.B/2013/Pn.Sidrap) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2014), h. 55.



dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya, dan Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seseorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetapi dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjnag dalam rentang kehidupan bagi kehidupan anak. Masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang

---

<sup>4</sup>Abdul Hakim M “*Ilmu Sosial Dasar Penerapan Hukum di Indonesia*”Skripsi Universitas Gunadarma (2014),h.58.

dewasa.<sup>5</sup>

### 3. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>6</sup>

### 4. Pengertian Pidana

- a. Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macamnya pidana.<sup>7</sup>
- b. Simon adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan hukuman pidana, barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuannya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>8</sup>

## C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis merumuskan, permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition.*, h.41.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>7</sup>Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Aneka cipta.jakarta.1993.h.7.

<sup>8</sup>Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2013) h.366.

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks ?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Secara Formil dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks ?

#### **D. Kajian Pustaka**

1. Skripsi Angga Pramitra dengan judul “Penerapan saksi pidana terhadap anak pelaku pidana narkoba dan psikotropika di pengadilan negeri Surabaya” Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum anak yang harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang lebih mengutamakan perlindungan anak dalam proses persidangan.
2. Skripsi Gilang Kresnanda Annas dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan *Diversi Dan Restorative Justice*” Skripsi ini membahas tentang Hak-hak anak dan HAM Hak Asasi Manusia, beserta pengadilan Anak.
3. Buku yang berjudul “Tindak Pidana Narkoba” buku ini menjelaskan materi-materi tentang tindak pidana narkoba baik dalam Undang-undang pidana maupun pasal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang keseluruhan ada didalam buku tindak Pidana.
4. Buku yang berjudul “Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda” buku ini menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan jumlah pemuda dalam mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba setiap tahunnya dalam hitungan bulan dan tahun, tentang status peningkatan narkoba dikalangan remaja.<sup>9</sup>

5. Buku yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana buku ini menjelaskan tentang Pasal 1 Ayat 1 di dalam KUHP “ Tidak ada seseorang yang dapat di hukum kecuali ada Undang-undang yang terlebih dulu mengaturnya” dan ini termasuk asas legalitas. Dan asas tiada pidana tanpa kesalahan juga termasuk dalam. Asas hukum pidana.<sup>10</sup>
6. Buku yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia buku ini menjelaskan tentang sejarah Hukum, Politik Hukum, dasar- dasar hukum positif Indonesia. Dan asas- asas serta kewenangan lembaga- lembaga peradilan di Indonesia.<sup>11</sup>

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil dalam Putusan Nomor: 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Secara Formil dalam Putusan Nomor: 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini :

##### **a. Manfaat Praktis**

1. Diharapkan dapat memberikan sarana bagi pemerintah khususnya

<sup>9</sup>Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta,2004, h. 85.

<sup>10</sup> Moelyatno.*Asas-Asas Hukum Pidana*. (Aneka Cipta.Jakarta.1993), hal. 7.

<sup>11</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*( Jakarta: Sinar Grafika,2013), h. 366.

Dinas Sosial lembaga kepemasyarakatan anak Kota Makassar sebagai acuan pengambilan keputusan terutama dalam menangani berbagai permasalahan sosial, anak yang pada umumnya mereka. Memerlukan perlindungan, penerapan hukum dan perhatian.

2. Bagi anak akan mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua, beserta keluarga yang ada disekitarnya. Karena mereka sadar akan pentingnya hak anak dan memberikan perlindungan dan penerapan hukum akan dimasa kecilnya untuk bekal nanti ketika beranjak dewasa.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat di setiap lembaga kepemasyarakatan anak di Kota Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, mengenai kasus tindakan Penerapan hukum terhadap anak yang mengedarkan dan memakai Narkoba.

## BAB II

### TINJAU TEORITIS

#### A. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana Anak

##### 1. Sejarah Hukum Pidana Anak

Terbentuknya hukum pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibu kota Negara, sudah terbentuk. Hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* secara lisan antara ketiga instansi tersebut untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Pemberian hukum atau saksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat



secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.

Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa. di Indonesia penyelenggara proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Peradilan Anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan serta pada Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. Sebagai “kertas putih dan bersih”, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk

menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.<sup>1</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus usia pelaku. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari Hukum Acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegakan hukum dalam menangani pelaku tindak pidana anak.<sup>2</sup>

## **B. Tinjauan Mengenai Hukum Materil dan Formil**

### **1. Pengertian Hukum Materil Dan Hukum Formil**

Hukum Materil adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan.

Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan

<sup>1</sup> Wagianti Soetojo, *Hukum Pidana Anak* ( Jakarta: PT. Reflika Aditama, 2016), h. 35-54

<sup>2</sup> Wagianti Soetojo, *Hukum Pidana Anak* ( Jakarta: PT. Reflika Aditama, 2016), h. 89-94

atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil perhatian ditujukan kepada isi peraturan.

Sedangkan pengertian Hukum Formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil disebut pula hukum Acara. Dalam pengertian hukum formil perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan atau melaksanakan isi peraturan.

Secara yuridis sumber hukum terdiri dari sumber hukum formal dan materil :

1. Sumber hukum Materil ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, misalnya : KUHP segi materilnya adalah pidana umum, kejahatan dan pelanggaran. KUHPerdata mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, perikatan, perjanjian, pembuktian dan daluarsa.
2. Sumber hukum Formil : sumber hukum yang dilihat dari segi yuridis dalam arti formil.yaitu: UU, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi, Doktrin.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil Dan Formil**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah

yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi: (b). Keterangan Ahli: (c). Surat: (d). Petunjuk: (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).<sup>3</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum ( Jakarta: 1998 ), h. 11.

peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>4</sup>

### **C. Penerapan Sistim Pidana Anak di Pengadilan (UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak)**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindakan pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilananya. Mengapa diperlakukan secara khusus hal ini terjadi, mengingat sifat anak keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungannya yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakikatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direlasasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 103.

penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan polisis, jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka dibawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara simpatik. Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam putusan presiden No. 36 tahun 1990 Konvensi Hak Anak, dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam UU Pengadilan Anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuannya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Dalam kasus, karena anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana. Namun pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil Hakim apabila kasus diteruskan sampai persidangan harus adil dan proporsional, serta tidak



semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Hal-hal ini dijamin serta diatur dalam UU Pengadilan Anak. Misalnya adalah pada saat polisi melakukan penangkapan dan pemeriksaan, ia wajib untuk menghubungi dan mendatangkan seorang petugas Bapas (Balai Pemasyarakatan, bisa juga disebut PK atau petugas Kemasyarakatan).

Petugas Bapas berfungsi hampir sama seperti *probation officer* atau pengawas masa percobaan. Polisi wajib menyertakan hasil Litmas penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas Bapas dalam Berita Acara Pemeriksaanya. Tanpa Litmas, Jaksa harus menolak BAP dan meminta kelengkapannya kembali. Litmas ini berisi tentang latar belakang anak secara keseluruhan, seperti data diri, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar sampai dengan latar belakang kasus, seperti kronologi kejadian, motif, gambaran mengenai seriusitas kasus, kondisi tersangka.<sup>5</sup>

Ada beberapa Pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Pemeriksaan Perkara dimuka Sidang, terhadap Anak:

a. Pasal 6

Hakim, penuntut umum, penyisik dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau memakai pakaian dinas.

---

<sup>5</sup> Wagianti Soetojo, *Hukum Pidana Anak* ( Jakarta: PT. Reflika Aditama, 2016), h. 33-35.

b. Pasal 8

1. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
3. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
4. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c. Pasal 56

Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

#### **D. Tinjauan Mengenai Anak**

##### **1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang**

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pengertian anak menurut pasal 34 UUD 1945 ‘ Orang-orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara’’. Hal ini mengandung

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Perkara di Muka Sidang.

pengertian bahwa anak adalah subjek hukum yang harus di lindungi, dipelihara dan diberdayakan untuk mencapai kesejahteraan.<sup>7</sup>

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.<sup>8</sup>

c. Pengertian anak menurut konvensi hak anak, definisi anak yang digunakan dalam *convention on the right of the child* (CRC) adalah definisi menurut konvensi Nomor 18, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa di capai lebih awal.<sup>9</sup>

d. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>10</sup>

e. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertua pada pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan anak adalah setiap manusia yang

<sup>7</sup> Pasal 34 Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Pasal 28 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

<sup>9</sup> Lis Sutina, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, h. 87.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>11</sup>

- f. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
- g. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti tertua pada pasal 330 KUHPerdata.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al- Bukhari dan Al-Imam Bukhari dan Al- Imam Muslim, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

“Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban”.

Untuk itu tidak bisa tidak, seorang guru atau orang tua harus tahu apa saja yang harus diajarkan kepada seorang anak serta bagaimana metode yang telah dituntunkan oleh junjungan umat ini, Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Beberapa tuntunan tersebut antara lain :

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah Swt berikan kepada setiap orang tua. Oleh karena itu orang tua

<sup>11</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>12</sup> Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi. Anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, apalagi kalau sampai terlibat atau tersangkut dalam masalah kriminalitas atau kenakalan remaja yang lain. Dalam al- Quran, Allah swt mengklasifikasikan kedudukan anak menjadi empat golongan yaitu :

1. Anak sebagai musuh, hal ini Allah jelaskan dalam surat at-Tagobun ayat 14 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan ank-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh Allah maha pengampun dan maha penyayang. Yang dimaksud anak sebagi musuh adalah apabila ada anak yang menjerumuskan bapaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.
2. Anak sebagai fitnah atau ujian, hal ini Allah jelaskan dalam surat at-Tagobun ayat 15, yang artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”. Fitnah yang dapat terjadi pada orangtua adalah manakala anak-

anaknya terlibat dalam perbuatan yang negative. Seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan atau perbuatan-perbuatan lainnya yang membuat susah dan resah orang tuanya.

3. Anak sebagai perhiasan, hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, yang artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi Amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih untuk menjadi harapan.” Perhiasan yang dimaksud adalah bahwa orang tua merasa sangat senang dan bangga dengan berbagai prestasi yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga dia pun akan terbawa baik namanya di depan masyarakat.
4. Anak sebagai penyejuk mata (qorrot a'yun) atau penyenang hati, hal ini Allah jelaskan dalam surat Al- Furqon ayat 74, artinya : “Dan orang-orang yang berkata “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” Kedudukan anak yang terbaik adalah manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orangtuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila disuruh untuk beribadah, seperti shalat, mereka segera melaksanakannya dengan suka cita. Apabila diperintahkan belajar, mereka segera mentaatinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlakunya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung



jawab yang tinggi.

Dari ke-empat kedudukan anak tersebut, tentu sebagai orang tua menginginkan agar anak-anaknya termasuk ke dalam kelompok qurrotq a'yun. Namun untuk mencapainya diperlukan keseriusan dan ketekunan orang tua dalam membina mereka. Orang tua hendaknya menjadi figur atau contoh buat anak-anaknya. Karena nak merupakan cermin dari orang tuanya. Jika orang tuanya rajin shalat berjama'ah misalnya, maka anakpun akan mudah kita ajak untuk shalat berjama'ah.<sup>13</sup>

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa haruslah dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Agama Islam memerintahkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai sia-sia, Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya

---

<sup>13</sup> <http://pustaka.abdissalam.com/index.php/anak-menurut-al-quran-dan-hadist.html> Diakses tanggal 14 Juni 2017, pukul 12.45.

untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Kepada kedua Orang tua, Masyarakat Bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'alamini dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara.<sup>14</sup>

Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga. Beberapa hukum positif di Indonesia memberikan pengertian yang autentik tentang anak, pengertian tersebut pada dasarnya terdiri dari persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut anak, umumnya kualifikasi yang dipergunakan adalah.<sup>15</sup>

1. Batasan Umur.

2. Status Perkawinan.

## **E. Tinjauan Mengenai Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**

### **1. Pengertian Narkoba**

Narkoba dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya sudah banyak di jelaskan oleh pakar kesehatan. Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

<sup>14</sup> Fuad Mohd, Fakhruddin, (1991), *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya. h. 386

<sup>15</sup> Fuad Mohd, Fakhruddin, (1991), *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya. h. 503.

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. contoh : heroin, kokain, morfin, dan opium.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contoh : kodein dan turunannya

- b. Psikotropika

Psikotropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan diteliti khasiatnya contoh: MDMA, LSD, STP, dan Ekstasi.

Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contoh : niterazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.<sup>16</sup>

- c. Zat Adiktif

Zat adiktif lainya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainnya, diantaranya

---

<sup>16</sup> Wikipedia, 2010”Narkoba” (Online) ([http:// id.wikipedia.org/wiki/Narkoba](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba). Diakses tanggal 21 Juni 2017, pukul 10:19)

adalah rokok.

## 2. Pengertian zat Narkoba

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan.

## 3. Dampak atau Bahaya Narkoba

Pengaruh narkoba secara umum ada tiga :

### a. Depresan

Menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh.

Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

### b. Stimulan

Merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan segar dan bersemangat dan kesadaran.

Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.

c. Halusinogen

Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.<sup>17</sup>

#### 4. Manfaat Narkoba Dalam Keadaan Darurat

Kadang beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam napza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredam rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat. dan dalam keadaan tersebut masih dibolehkan mengingat kaedah yang sering dikemukakan oleh para ulama :

*Imam Nawawi rahimahullah* berkata, Seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Yang tepat adalah dibolehkan.

*Al Khotib Asy Syarbini* dari kalangan Syai'iyah berkata, Boleh menggunakan sejenis napza (Narkoba) dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah darurat.

#### 5. Dalil Tentang Narkoba

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. *Ibnu Taimiyah* berkata, Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan

---

<sup>17</sup> BNK Samarinda. 2007 "Faktor dan Akibat Narkoba " (online), (<http://bnk.samarinda.go.id/index.php?q=faktor-akibat-narkoba>, diakses tanggal 12 Juni 2017, pukul 11 : 47

akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan.

Adapun dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba diantaranya :

a. QS al-Araf / 7 : 157

وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ﴿١٥٧﴾

Terjemahanya :

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS al-Araf / 7 : 157).<sup>18</sup>

Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. di antara makna khobits adalah yang memberikan efek negatif.

b. QS al- Baqarah / 2 : 195

وَلَا تُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ ﴿١٩٥﴾

Terjemahanya :

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS al- Baqarah / 2 : 195) <sup>19</sup>

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI., Al – Quran dan Terjemahannya ( Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 295.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI., Al – Quran dan Terjemahannya ( Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. .338.

c. QS. al- Nisa / 4 : 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahanya :

Dan Janganlah Kamu Membunuh Dirimu Sesungguhnya Allah  
Adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. al- Nisa / 4 : 29)<sup>20</sup>

Tiga ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.



<sup>20</sup> Kementerian Agama RI., Al – Quran dan Terjemahannya ( Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. .568.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Dan Lokasi Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian data primer dan data sekunder yang membahas tentang penerapan hukum pidana Anak, bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar.

Alasan penulis memilih tempat tersebut institusi tersebut yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan data mengenai penegakan Pasal 114 (1) Subs.pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan secara primer dan sekunder dimana penelitian yang dilakukan adalah secara Study kasus, wawancara dan survey yang pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang mengalami kasus tertentu.



### C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu :

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini seperti hakim pada Pengadilan Negeri Makassar.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, putusan hakim dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### D. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan ( *field research* )
2. Wawancara (*Interview*) sehubungan dengan kelengkapan data yang dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penulis.
3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian terhadap tindakan Anak yang mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba.

4. Penelitian pustaka (*library research* ) penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, observasi dan Instrument penelitian inilah yang menggali data dari sumber-sumber informasi.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### **1. Teknik Pengelolaan Data**

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul baik dari studi pustaka kemudian disusun secara kualitatif dan disajikan secara sistematik dengan menggunakan metode pembahasan secara deskriptif yaitu pembahasan ilmiah dengan cara menggambarkan kata-kata yang bersifat umum menuju sifat khusus. Dalam penelitian data diolah secara komputerisasi hal ini merupakan cara yang sangat efektif mengingat banyak program-program yang dapat membantu dalam penyusunan data secara sistematis dengan laporan bab demi bab, dan memudahkan menganalisis data yang diperoleh.

## 2. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar**

Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan merupakan Pengadilan Kelas 1A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharannya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam :

1. Administrasi Kepanitraan.
2. Administrasi Kesekretariatan.

Pengadilan Negeri selaku salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dibidang hukum perdata dan pidana. (pasal 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Negeri Makassar yakni sebagai berikut : Visi, Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah

bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Sedangkan misinya yaitu, mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang Dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.<sup>1</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil Dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks.**

### **1. Identitas Terdakwa**

Adapun identitas terdakwa yaitu sebagai berikut :

Nama	: MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tanggal Lahir	: 14 Tahun / 29 September 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Tinumbu Lr. 2 Nomor 292 Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

---

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar (PN. KELAS 1A MAKASSAR), “ Visi dan Misi”, *Situs Resmi PN Makassar*.[http://www.pn-makassar.go.id/Visi\\_Misi](http://www.pn-makassar.go.id/Visi_Misi), ( 18Maret 2017).

## 2. Posisi Kasus

Berdasarkan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara : PDM-31/ Mks/Euh.2/04/2016 tanggal 15 April 2016, bahwa terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN, Pada hari Selasa, tanggal 02 April 2016 sekira pukul 14 : 30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Urip Sumiharjo- Tello, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman berupa 2 ( dua) sachet plastik berisi kerystal bening dengan berat keseluruhan 0,9698 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan bungkus sachet plastik kosong dan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram.
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut, Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN menerangkan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Lel. FIKAL (DPO Polrestabes Makassar) yang akan Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN antar kerumah Lel. FIKAL yang berada dilokasi penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN juga menerangkan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh Lel. FIKAL dari

ibu Terdakwa yang bernama SALMA (DPO Polrestabes Makassar) begitupun dengan sachet plastik kosong juga milik Lel.FIKAL.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa Terdakwa MUH. IKBAL BIN SAHARUDDIN mengetahui kalau memiliki, menyimpan maupun menggunakan shabu-shabu dilarang namun karena yang menyuruh adalah teman ibunya dan ibunya juga tidak keberatan maka Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN tetap melakukannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No LAB : 1319/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang dibuat oleh I Gede Suarthawan, Ssi., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, Tim yang memeriksa barang bukti pada pusat Laboratorium forensik POLRI Cabang Makassar, ditemukan : “Barang bukti kristal bening dan urine milik MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN, tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar

Hakim IG EKO PURWANTO, SH., M. Hum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Muh. Ikbil bin Saharuddin bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muh. Ikbil bin Saharuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan Pelatihan kerja di depsos selama 3 (tiga) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (Dua) sachet plastic yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram.
  2. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi sachet plastic kosong.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim Anak terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:



Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintahan yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan
  - Anak mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatannya
  - Anak belum pernah dihukum
1. Menimbang bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.
  2. Mengingat Pasal 112 (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan pasal 71 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- a. Menyatakan Anak MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN” dalam dakwaan alternatif ke

dua ;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan pelatihan kerja di lembaga yang ditunjuk Departemen Sosial Selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis dengan berat keseluruhan 0,9517 (nol koma sembilan ribu lima ratus tujuh belas) gram yang merupakan sisa dari barang bukti nomor label 3535/2016/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 (nol koma sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sachet plastik kosong dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 10 MEI 2016 oleh kami IG.EKO PURWANTO, SH., M. Hum. Hakim Anak berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 114/Pid.Sus-

Anak/2016/PN Mks tanggal 22 April 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, di bantu oleh ANDAYANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANDI MUJAHIDIN AMAL, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Anak didampingi oleh MIKHAELDONI BANDASO, SH. Penasehat Hukum Anak dan MUH. HUSNI GUNA Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pada Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar.

#### **D. Pembahasan Unsur Pasal**

- a. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah).
- b. Unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :
  1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Anak Muh.Ikbal bin Hasaruddin yang dihadapkan dipersidangan ini belum tentu dialah pelakunnya, karena fakta-fakta dipersidangan tidak ada yang menjelaskan keterlibatannya, apalagi Saksi Muh. Arham dan Saksi Suandi Yusran hanya menerangkan perbuatan Salma dan Fikal tetapi tidak menangkap Salman dan fikal padahal saksi mengakui bahwa saksi punya tim yang bekerja selama 1 minggu melaksanakan penyelidikan tetapi tidak dapat menangkap Salma dan Fikal. Dengan demikian tidak ada seorang saksipun yang menyebutkan peranan Anak.

Saksi tidak menyaksikan bagaimana dan dengan cara apa Anak memperoleh Narkotika. Saksi hanya menyaksikan penggeledahan tanpa izin yang sah berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa oleh karena Saksi hanya bersifat *Testimonium de auditu* maka keterangan saksi menyangkut Unsur setiap orang tidak memiliki kekuatan sebagai Alat Bukti Yang Sah.

## 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Bahwa fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi tidak terbukti bagaimna keterlibatan Anak dalam jual beli narkotika, yang jelas peranan para saksi yang melakukan transaksi jual beli narkotika tersebut adalah salma dan fikal yang sudah dikenal oleh polisi sebagai DPO dimna saksi telah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu, pertanyaanya dimna

peranan Anak dalam kasus ini ? para saksi tidak menjelaskan dari siapa atau yang membawa narkoba, tidak juga dijelaskan mereka diperkenalkan dan atau yang membawa narkoba itu Anak ? saksi seolah-olah sangat mengenal salma dan fikal karena telah 1(satu) minggu melaksanakan penyelidikan bukan waktu yang singkat

Bahwa keterangan saksi sangat jelas mengenal Fikal dan Salma. terbukti bahwa Saksi sangat mengetahui bahwa ada Narkoba dicelana Anak, kalau saksi tidak mengenal Salma dan fikal tidak mungkin saksi menemukan Anak dan mengetahui ada narkoba dicelana apalagi penangkapan dilakukan saksi secara bergerombolan.

Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, Pasal 114 (1) Subs.pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pada unsur diatas dimaksud dengan Anak dalam hal ini diri korban anak laki-laki MUH. IKBAL bin SALAHUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, Pasal 114 (1) Subs.pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Membebaskan Anak MUH. IKBAL bin SALAHUDDIN dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini atau setidaknya melepaskan Anak dari semua tuntutan hukum.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 adalah sebagaimana terdaftar dalam lampiran 1 UU No. 35 tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa pada hari sabtu tanggal 2 april 2016 sekitar 14.30 wita terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin telah tertangkap oleh petugas dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar tertangkap oleh petugas dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar di Tello Jl. Urip Sumuharjo Kota Makassar dan pada saku celananya di temukan bungkus sachet plastic kosong dan 2 (dua) sachet plastic yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram,. Disamping itu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB 1319/NNF/IV/2016 Tanggal 8 April 2016 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.si M,si Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, Tim yang memeriksa Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, ditemukan:
- Barang bukti Kristal bening dan urine milik Muh. Ikbal bin Saharuddin tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-

Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**E. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Formil Dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks.**

Hakim ketua yang memutuskan perkara ini, Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks. tentang Narkotika Golongan 1 bukan tanaman mengatakan bahwa proses hukum acara yang dipake dalam perkara ini adalah hukum materil dan formil. Berdasarkan berkas perkara, Majelis hakim menimbang penetapan Hakim anak tanggal 25 April 2016 Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks tentang hari sidang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, di persidangan dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan sebagai berikut:

- 1) Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak.
- 2) Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- 3) Telah mendengar Tuntutan Pidana Dari **Penuntut Umum** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 mei 2016, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
- 4) Menyatakan terdakwa MUH. IKBAL bin SALAHUDDIN bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu memilikinya, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke dua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 5) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. IKBAL bin SALAHUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan pelatihan kerja di Depsos selama 3 (tiga) bulan.
- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5 000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari *Penasehat Hukum* Anak yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 mei 2016 pada pokoknya mohon kepada hakim agar berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUH. IKBAL bin SALAHUDDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menyatakan Anak MUH. IKBAL bin SALAHUDDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
3. Membebaskan Anak MUH. IKBAL bin SALAHUDDIN dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini atau setidaknya melepaskan Anak dari semua tuntutan umum.
4. Memulihkan Hak anak tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menyatakan barang bukti 2 sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi sachet plastik kosong untuk dimusnahkan.



6. Dan atau, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidannya dan tanggapan terakhir dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya:

Menimbang bahwa Anak tersebut didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN NO.REG. PERK. : PDM 31/Mks/Euh.2/04/2016 tanggal 15 April 2016

Menimbang, bahwa persidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama MUH.ARHAM, SH dan SUANDI YUSRAN. Sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## F. Analisis Putusan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim Suparman Nyompa, SH., MH yang menjadi Hakim ketua Pengadilan Negeri Makassar, menjelaskan bahwa pada unsur pertama ini “Unsur setiap orang” mengenai berdasarkan saksi dan terdakwa di persidangan membenarkan frase dalam kalimat tersebut yakni setiap orang. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama setiap orang telah terpenuhi :

1. Secara Obyektif
2. Secara Subyektif

Adapun kata-kata lainnya yang dalam unsur tersebut menurut beliau tidak menjadi persoalan karena terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Masih terkait wawancaradengan hakim Suparman Nyompa, SH., MH unsur kedua diatas yang menjadi kajian awal adalah “tanpa hak dan melawan hukum” kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Yang mana berbicara unsur “tanpa hak dan melawan hukum” bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi.

Bahwa “tanpa hak dan melawan hukum” atau melawan hukum tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materil, yakni “memiliki, menyimpan,

---

<sup>2</sup>Suparman Nyompa, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara, Makassar, 12 desember 2016*

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan materil dan formil.

#### **G. Analisis Fakta-Fakta Persidangan :**

- Bahwa tidak jelas keterlibatan Anak dalam kasus ini.
- Bahwa tidak jelas peranan Anak dalam kasus ini.
- Bahwa tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Anak sebagai pengguna. sebagai penjual, pembeli, pengedar dan perantara. Karena saksi tidak menyaksikan Anak menjual, membeli, mengedarkan, atau pun menjadi perantara, dari keterangan Saksi Muh. Arham, SH dan Saksi Suandi tidak ada petunjuk bahwa saksi pernah menyaksikan Anak menjual, membeli, mengedarkan, atau pun menjadi perantara. Bahkan Saksi pun tidak mengetahui tentang bagaimana dan dengan cara apa Anak mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman
- Bahwa para saksi hanya menyaksikan penangkapan terhadap Anak di Jl.Urip Sumoharjo, tanpa diketahui apa kesalahan Anak.
- Bahwa para saksi, yaitu saksi Muh.Arham, SH bersama Saksi suandi Yusran, SH dalam kasus ini saling mendukung satu sama lain, tetapi dalam keterangannya sama sekali tidak menjelaskan peranan dan keterlibatan anak, bahkan Muh. Arham, SH tidak mengenal Anak.
- Bahwa Anak hanya dilibatkan tanpa diketahui peranan dan perbuatannya dalam kasus ini, sehingga hak-hak Anak dirugikan karena penangkapan dan penasehat kasus ini.

- Bahwa hasil pengembangan kasus ini oleh penyidik telah melanggar hak-hak asasi manusia sebab baik penyidik maupun JPU tidak dapat membuktikan kesalahan Anak.
- Bahwa barang-bukti yang diajukan oleh JPU tidak jelas barang bukti milik siapa, karena boleh jadi barang bukti tersebut disita bukan dari tangan Anak, tetapi dari saksi-saksi lain yang terlibat langsung seperti saksi Salma dan Saksi Fikal karena merekalah yang jelas peranan dan keterlibatannya.

#### **H. Analisis Yuridis**

- a. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah).
1. Unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum. Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya tersangka Lk. MUH IKBAL bin SAHARUDDIN.
2. Unsur Menerima Narkotika Gol 1 Bukan Tanaman :
3. Menerima Narkotika Gol 1 Bukan Tanaman : Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya tersangka Lk. MUH IKBAL bin

SAHARUDDIN yang telah menerima penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari Lk RIJAL (DPO) yang kemudian dimasukkan kedalam bungkus saset plastik kosong kemudian dikantongi di kantong celana depan sebelah kanan dan dibawah ke jalan urip sumiharjo kemudian tertangkap. sehingga unsur melawan hukum **Menerima** Narkoba Golongan 1 yang dilakukan oleh tersangka **Lk. MUH IKBAL bin SAHARUDDIN** telah **terpenuhi**.

- b. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba : Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.- (Delapan milliar Rupiah).
  1. Unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum. Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya tersangka **Lk. MUH IKBAL bin SAHARUDDIN**.
  2. Unsur Menyimpan Narkoba Gol 1 Bukan Tanaman
    - Menyimpan Narkoba Gol 1 Bukan Tanaman : Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya tersangka Lk MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN yang telah tertangkap di Urip Sumiharjo Makassar dengan ditemukannya dua saset plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus saset kosong di dalam kantong celana depan sebelah kanan Lk MUH IKBAL bin

SAHARUDDIN yang sebelumnya diterima dari Lk RIZAL /DPO dirumahnya kemudian dibawa / disimpan / dikantongi dan dibawa ke jalan urip sumiharjo kemudian tertangkap. Sehingga unsur **Menyimpan** Narkotika Gol 1 Bukan Tanaman yang dilakukan oleh tersangka **Lk MUH IKBAL bin SAHARUDDIN** Telah **Terpenuhi**.

3. Unsur **Menguasai** Narkotika Gol 1 Bukan Tanaman :

- **Menguasai** Narkotika Gol 1 Bukan Tanaman: Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya tersangka Lk MUH IKBAL bin SAHARUDDIN yang telah tertangkap di Urip Sumiharjo Makassar dengan ditemukannya dua saset plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus saset kosong di dalam kantong celana depan sebelah kanan Lk MUH IKBAL bin SAHARUDDIN yang sebelumnya diterima dari Lk RIJAL /DPO dirumahnya kemudian dibawa/disimpan/dikantongi/ berada dalam penguasaannya dan dibawa ke jalan Urip sumiharjo kemudian tertangkap sehingga unsur **Menguasai** Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh tersangka Lk **MUH IKBAL bin SAHARUDDIN** telah **terpenuhi**.
- Saksi BRIPKA MUH ARHAM, SH dan BRIGPOL SUANDI YUSRAN membenarkan dirinya telah melakukan penangkapan terhadap Lk MUH IKBAL bin SAHARUDDIN di jalan Urip Sumiharjo Makassar dan menemukan dua saset plastik bening

berisi narkoba jenis sabu-sabu dan satu bungkus saset plastik kosong di saku celana depan sebelah kanan milik **LK MUH IKBAL bin SAHARUDDIN**.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam berita acara pemeriksaan No Pol : R / 2088/IV/2016/ Labfor cab. Makassar tanggal 12 April 2016 menyatakan bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang setelah dilakukan pemeriksaan berat awal 0,9698 Gram dan berat akhir 0,9517 gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK SIDANG  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

**A. GAMBARAN TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN KEPADA  
TERDAKWA**

**1. Jenis Tindak Pidana**

Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Subs. Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**2. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana**

Waktu klien pulang sekolah, klien melihat LK FIKAL ada dirumah klien, kemudian klien disuruh sama ibunya pergi membeli saset kosong dibelakang rumah klien. Kemudian setelah klien datang, klien melihat ibu klien memberikan shabu-shabu dua paket ke LK FIKAL kemudian klien menyuruh tante salinah untuk membawa shabu ke LK IKBAL, karena klien pergi membeli shabu di terowongan fajar.

**3. Kronologis Terjadinya Tindak Pidana**

Pada hari sabtu tanggal 02 april 2016, klien baru pulang sekolah sekitar pukul 13.00 wita kemudian klien ketemu dengan lk fikal dan ibu klien di rumah kemudian lk fikal menyuruh klien untuk pergi beli saset kosong dibelakang rumah dan diberinya klien uang sepuluh ribu rupiah, kemudian klien pergi membeli saset kosong dibelakang rumah dan setelah itu klien kembali kerumah dan waktu klien masuk diruang tamu klien sampaikan ke lk fikal kalau ini saset kosongnya dan klien lihat lk fikal



dikasih dua bungkus shabu-shabu sama ibu/ mama klien, kemudain lk fikal sampaikan ke ibu/mama klien kalau “Tante Salma disuruh dulu bawah ini shabu sama ikbal ke rumahku karena mauka saya lk fikal pergi mengantar barang. Shabu-shabu di terowongan fajar” Kemudian klien kasih masuk didalam sasetan kosong kemudian klien kantong di celana depan klien sebelah kanan, lalu klien keluar dan lk fikal juga keluar pergi mengantar. Klien pergi ke rumah lk fikal di jalan Urip Sumiharjo dan pada saat klien di depan rumah lk fikal kemudian datang polisi menangkap klien dan memeriksa klien dan menemukan bungkus saset kosong tersebut yang didalamnya juga ada paket shabu-shabu dari perbuatan klien tersebut sehingga di duga melanggar Pasal 114 (1) Subs Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **4. Modus Operandi**

Klien ketemu dengan lk fikal dan ibu klien di rumah, kemudian lk fikal menyuruh klien untuk pergi beli saset kosong dibelakang rumah dan diberinya klien uang sepuluh ribu rupiah pergi beli saset kosong dibelakang rumah kemudian klien pergi membeli saset kosong dibelakang rumah dan setelah itu klien kembali kerumah dan waktu klien masuk diruang tamu klien sampaikan ke lk fikal kalau ini saset kosongnya dan klien lihat lk fikal kasih dua bugkus shabu-shabu sama ibu/mama klien. Kemudian lk fikal sampaikan ke ibu/ mama klien kalau “Tante salma kusurh bawaki dulu ini shabu sama ikbal kerumah karena mauka saya kerumahku karen mauka saya pergi mengantar barang shbau dulu ini

terowongan fajar” kemudian klien dikasi 1k fikal shabu-shabu tadi sebanyak dua bungkus dan kemudian klien dikasih masuk di dalam sasetan kosong kemudian klien kantongi di celana depan klien sebelah kanan, lalau klien keluar dan 1k fikal juga keluar pergi mangantar. Klien pergi ke rumah 1k fikal di jalan Urip Sumiharjo dan pada saat klien di depan rumah 1k fikal kemudian datang polisi menangkap klien dan memeriksa klien dan menemukan bungkus saset kosong tersebut yang didalamnya juga ada paket shabu-shabu dari perbuatan klien tersebut sehingga di duga melanggar Pasal 114 (1) Subs Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **5. Motivasi Terdakwa Melakukan Tindak Pidana**

Klien termotivasi melakukan Tindak Pidana karena klien ingin mendapatkan uang karena orang tua klien berpisah / Bercerai beberapa tahun yang lalu, sehingga ibu klien berperan sebagai tulang punggung dalam keluarga.

#### **6. Peranan Klien Dalam Tindak Pidana**

Menurut pengakuan klien. Klien Mencoba Narkotika jenis shabu tersebut, Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai

##### **a. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Klien**

##### **1. Terhadap Diri Klien**

Klien ditahan oleh penyidik Polrestabes Makassar, untuk menjalani proses hukum karena klien terlibat melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika

## 2. Terhadap Keluarga

Dampak dari perbuatan yang dilakukan klien terhadap keluarga klien, merasa di repotkan dan tidak tenang karena selalu memikirkan klien akan saksi hukum yang akan diterimannya.

## 3. Terhadap Korban

Dalam hal ini tidak ada korban karena klien sendiri yang merasa akibat dari perbuatannya tersebut.

## 4. Terhadap Lingkungan Masyarakat

Masyarakat disekitar rumah tante klien telah mengetahui masalah klien dan atas perbuatan klien terlibat melakukan tindak kejahatan Penyalahgunaan Narkotika.

## b. Riwayat Hidup Klien

### 1. Riwayat Pertumbuhan dan Perkembangan Klien

- a. Menurut keterangan orang tua terdakwa. Bahwa selama kurang lebih sembilan bulan ibu klien mengandung tidak pernah menderita suatu penyakit yang dapat mengganggu kandungannya, hingga klien lahir dalam keadaan normal di Makassar pada tanggal 29 september 2001 kondisi fisik dan fisikis klien berada dalam kondisi normal dan tidak mengalami kelainan bawaan, selama ibu klien hamil rutin memeriksakan kesehatan kandungannya di puskesmas / rumah sakit.
- b. Menurut keterangan orang tua klien sejak kelahirannya, klien diasuh dan dibesarkan oleh orang tua, namun setelah orang tua

klien bercerai beberapa tahun yang lalu, klien tinggal bersama ibu klien, dengan pola hidup sederhana, klien dapat tumbuh dan berkembang secara normal seperti anak-anak yang lain seusiannya.

a. Riwayat Kesehatan Klien

Secara umum klien mengalami perkembangan kesehatan dengan baik, menurut keterangan tante klien sejak klien lahir hingga saat ini belum pernah menderita suatu penyakit yang membahayakan keselamatan jiwanya, klien hanya sakit ringan seperti demam dan flu yang bisa disembuhkan dengan obat yang tersedia di warung atau ditokoh-tokoh obat.

a. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal Sejak klien berumur 6 tahun klien masuk sekolah Dasar Negeri (kelas 1) kemudian klien tidak melanjutkan pendidikannya lagi, hingga klien tamat SMP
2. Pendidikan Non Formal, selama ini klien belum pernah mengikutinya baik yang bersifat skill atau keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus atau dari instansi pemerintah.

- Riwayat Pekerja

Klien saat ini belum bekerja, namun klien ingin membantu keluarganya tersebut mencari nafkah.

- Riwayat Pelanggaran hukum klien

Klien baru pertama kali beradapan dengan hukum atau tersangkat masalah tindak pidana.

b. Kondisi Keluarga

1. Riwayat Pernikahan Orang Tua

Menurut keterangan wali klien, orang tua klien melangsungkan pernikahannya menurut ajaran agama islam di makassar beberapa tahun yang lalu dengan dasar suka sama suka dan direstui oleh kedua orang tuannya masing-masing kedua belah pihak, dari hasil perkawinan tersebut orang tua klien dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, klien merupakan anak tunggal, orang tua klien cerai kurang lebih 10 tahun yang lalu, kedua orang tua klien masing-masing sudah menikah.

2. Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Klien

Menurut keterangan wali (tante) sejak klien lahir klien diasuh oleh orang tua (ibu) dengan hidup sederhana, namun setelah bercerai klien diasuh oleh tantenya, klien dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan berperilaku baik dan sopan kepada orang lain sehingga dalam pergaulan sehari-hari dengan teman-temannya klien dapat menyesuaikan diri dan belum pernah terlibat percekocan dengan teman-temannya.

## 2. Hubungan Sosial Orang Tua/Wali, Keluarga Dengan Masyarakat

Wali klien dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat disekitarnya, hubungan wali klien dengan masyarakat berjalan cukup baik, rukun dan damai serta saling membantu bila ada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan dan saling mendukung bila ada kegiatan baik bersifat keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

## 3. Keadaan Ekonomi Keluarga

Keadaan sosial ekonomi orang tua klien berada di kelompok ekonomi menengah kebawah yang mana pendapatan orang tua klien sebagai pembantu rumah tangga di pakai untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

### a. Kondisi Lingkungan Masyarakat Setempat

#### 1. Keadaan Geografis

Lingkungan tempat tinggal orang tua klien tepatnya berada di jl. Tinumbu Lrg.2 no.292, kota Makassar. Rumah tersebut merupakan rumah hak milik dan mengenai keadaan alamnya sejuk, keadaan masyarakat disekitar tempat tinggal keluarga klien pada umumnya beragam islam.

#### 2. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian masyarakat disekitar tempat tinggal orang tua klien bervariasi seperti Pegawai swasta , PNS dan

berwariswasta.

### 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan warga masyarakat dilingkungan tempat tinggal orang tua klien yaitu tamat SD, SMP, SMA dan ula yang lulus S1.

### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Strata kehidupan sosial ekonomi masyarakat dilingkungan tersebut pada umumnya dari kalangan ekonomi menengah kebawah ini dilihat dari rumah penduduk dan adanya fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat, dari bangunan rumah tempat tinggal penduduk sebagian rumah panggung dan sebagaian rumah batu.

### 5. Nilai dan Norma Serta Kebiasaan Yang Berkembang di Masyarakat Yang Positif dan Negatif

Nilai dan Norma serta kebiasaan yang berkembang dimasyarakat yang positif adalah terciptannya kerjasama yang baik antara satu dengan lainnya dan damai serta saling membantu bila ada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan dan saling mendukung pula bila ada kegiatan yang bersifat keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dan terpeliharannya rasa kebersamaan dan gotong royong diantara sesama warga.

Sedangkan yang Negatif adalah masih ada warga masyarakat yang malas tidak mau terlibat bila ada kegiatan baik bersifat keagamaan maupun kegiatan sosial masyarakat seperti masih ada warga yang kurang sadar dalam hal bergotong royong melakukan kebersihan lingkungan, ini terbukti bila mana ada kegiatan pemerintah setempat tidak ikut bersama-sama bekerja bakti dalam hal kebersihan lingkungan.

#### 6. Fasilitas Sosial dan Umum

Tidak jauh dari rumah klien terdapat mesjid untuk dipakai shalat berjamaah

#### b. Tanggapan Klien Terhadap Masalah Yang Dihadapinya

##### 1. Tanggapan / Sikap Penyesalan Klien Terhadap Pelanggaran dan Proses Hukum Yang Dijalaninya

2. Klien sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya klien sangat mengharapkan keringanan hukuman agar dapat berkumpul bersama dengan tante dan sepupunya.

##### 3. Tanggapan dan Penilaian Klien Terhadap Kesalahannya.

Klien merasa sangat menyesal dan merasa bersalah karena telah terlibat melakukan tindak pidana, sehingga klien diproses di Plrestabes Makassar.

##### 4. Tanggapan Tentang Konsekuensi dan Dampak



Pelanggaran Yang Dilakukan Terhadap Dirinya Sendiri,  
Korban, Keluarga dan Lingkungan Masyarakat.

c. Terhadap Diri Klien

Klien dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga klien diproses secara hukum dan klien berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seperti apa yang pernah dilakukannya.

d. Terhadap Korban

Dalam hal ini tidak ada korban, karena klien sendiri yang merasakan akibat dari perbuatannya tersebut.

e. Terhadap Keluarga

Dampak dari perbuatan klien terhadap keluarganya dalam hal ini tante klien sangat menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh klien tersebut. Tante klien mengharapkan kepada yang berwajiban untuk penyelesaiannya secara adil dan bijaksana dan memperoleh keringanan hukuman untuk klien.

f. Terhadap Lingkungan Masyarakat

Masyarakat dalam ini keluarga klien sendiri sudah mengetahui masalah klien bahwa klien terlibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Hingga klien di proses di Polrestabes Makassar.

g. Kebutuhan Klien

1. Perlunya orang tua/wali klien lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap klien agar klien tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum.
2. Klien kiranya perlu diberikan pemahaman tentang bimbingan keagamaan sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang tercela.

h. Pandangan Masa Depan

Selain berharap proses hukumnya secepatnya bisa selesai, klien akan menghadapi semua pelanggaran hukum termasuk perbuatannya di sangkarakannya dan klien ini membantu tantenya /sepupunya.

i. Keadaan Lingkungan Masyarakat

Lingkungan tempat tinggal klien, keadaan lingkungannya pun sangat padat, sehingga mudah terjadi tindak kejahatan, masyarakat disekitar tempat tinggal orang tua klien mayoritas beragama islam, untuk tingkat kesejahteraanya berada pada kelompok menengah ke bawah berprofesi sebagai pegawai swasta, dan lain-lain.

a. Tanggapan Pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah

1. Tanggapan Pihak Orang Tua Klien

Orang tua/ wali klien terkejut setelah mendengar bahwa klien terlibat lagi melakukan tindak pidana melanggar hukum dan

diproses, yang membuat keluarga menyesalkan perbuatan klien tersebut, orang tua/wali klien tetap mengharapkan agar diberikan keringanan hukuman kepada klien dan orang tua bersedia membimbing dan mengawasi klien.

## 2. Tanggapan Pihak Korban

Dalam hal ini tidak ada pihak korban karena klien sendiri yang merasakan akibat dari perbuatannya.

## 3. Tanggapan Masyarakat

Masyarakat disekitar rumah klien sangat prihatin kepada klien karena klien telah terlibat melakukan tindak pidana melanggar hukum

## 4. Tanggapan Aparat Pemerintah

Pihak masyarakat dan pemerintah setempat pada prinsipnya menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah klien dengan memperhatikan kepentingan masa depan klien dan masih menerima dengan baik bila klien dikembalikan ketengah-tengah keluarga dan masyarakat.

## 5. Tanggapan TPP Bapas

Pada dasarnya Tim Pengamat Pemasyarakat (TPP) menerima saran dan pendapat yang dikemukakan Pembimbing Kemasyarakat tersebut yaitu : Sebaiknya klien di titip/ dibina atau wajib lapor dan perawatan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI yaitu YAYASAN KEMPOK PEDULI

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA dan OBAT-OBATAN TERLARANG (YKP2N), yang berkedudukan di Jl. Faisal XII No. 48 Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien perlu diberikan bimbingan keagamaan seperti ceramah agama agar klien dapat terhindar dari perbuatan yang tercela.
2. Setelah proses hukumnya selesai klien akan tetap membantu orang tuanya bekerja sebagai instalasi listrik.

#### 6. Analisa Masalah Klien

Klien melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (1) Subs. Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atas perbuatan klien sehingga diproses di Polrestabes Makassar. Klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum.

#### 7. Tindak Lanjut Proses Diversi

Dalam hal ini proses hukum ditingkat Penuntutan Pihak Kejaksaan Negeri Tetap mengupayakan DIVERSI. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum dan tetap berperilaku baik
- Klien masih berstatus sebagai pelajar
- Klien masih butuh bimbingan dari orang tuanya
- Klien perlu dipisahkan dari teman-temannya, yang sering melanggar hukum.

8. Keterangan Saksi :

**Saksi I Nama** : MUH ARHAM. SH ,Lahir di selayar pada tanggal oktober 1980 umur 36 tahun, suku : Makassar, kebangsaan Indonesia, Agama islam, pekerjaan : Polri, Alamat Jl. Jend Ahmad Yani No. 9 Makassar.

**Menerangkan :**

- a. Ia diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b. Bahwa ia berteman adalah anggota satuan serserce yang ditugaskan untuk mengungkap kasus peredaran dan penyalagunaan narkoba di wilayah hukum polrestabes makassar dimana pada saat ia berteman melakukan patroli disekitar jalan tibumbu makassar ia melihat seorang laki-laki yang tingkah lakunya sangat mencurigakan yang ia yakini adalah pelaku kejahatan sehingga ia berteman mengikuti laki-laki tersebut
- c. Bahwa ia berteman mengikuti laki-laki tersebut sampai ke jalan Urip Sumiharjo/ tello makassar dari melihat laki-laki tersebut singgah di salah satu rumah
- d. Bahwa ia berteman kemudian mendekat laki-laki tersebut dan mengaku kepadanya berteman bernama IKBAL
- e. Bahwa pada saat ditanyakan identitasnya lk IKBAL terlihat sangat gelisah, sehingga ia berteman meminta izin untuk

melakukan pemeriksaan.

- f. Bahwa pada saat ia berteman memeriksa kantong celana depan sebelah kanan lk IKBAL ia berteman menemukan bungkus saset kosong yang setelah dibuka didalam bungkus saset kosong tersebut berisi dua saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu
- g. Bahwa ia memperlihatkan kedua saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada lk IKBAL dan menanyakan sumber/asal dari kedua paket tersebut yang dijelaskan oleh lk IKBAL jika kedua paket shabu tersebut diperoleh lk FIKAL dirumahnya sendiri lk IKBAL.
- h. Bahwa lk IKBAL juga menjelaskan kepadanya berteman jika shabu-sabu tersebut diperoleh LK FIKAL (DPO) dari ibunya lk IKBAL dirumahnya lk IKBAL.
- i. Bahwa ia masih mengenali terhadap dua saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dan bungkus plastik kosong di pelihara kepadanya dan membenarkan jika barang-barang tersebut adalah yang telah ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan lk IKBAL pada saat dilakukan penangkapan
- j. Jika keterangan yang diberikannya adalah sudah keterangan yang sebenarnya dan bersedia mempertanggung jawabkan dikemudian hari.

9. Saksi II Nama :

SUANDI YUSRAN , Lahir di Makassar , umur tahun suku Makassar , Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan :polri  
alamat : Jl . Ahmad yani no , 9 makassar.

- a. Ia diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohai serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b. Bahwa ia bernama adalah anggota saluran reserse narkoba yang ditugaskan untuk mengungkap kasus peredaran dan penyalagunaan narkoba di wilayah hukum polrestabes makassar dimana pada saat ia berteman melakukan patroli disekitar jalan tinumbu makassar ia melihat seorang laki-laki yang tingkah lakunya sangat mencurigakan yang ia yakini adalah pelaku kejahatan sehingga ia berteman mengikuti laki-laki tersebut.
- c. Bahwa ia berteman mengikuti laki-laki tersebut sampai ke jalan Urip Sumiharjo/tello makassar dan melihat laki-laki tersebut singgah disalah satu rumah
- d. Bahwa ia berteman kemudian mendekati laki-laki tersebut dan kemudian menyatakan identitasnya dimana laki-laki tersebut mengaku kepadanya berteman bernama IKBAL
- e. Bahwa pada saat ditanyakan identitasnya lk IKBAL ia terlihat sangat gelisah, sehingga ia berteman meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan

- f. Bahwa keterangan yang diberikannya adalah sudah keterangan yang sebenarnya dan bersedia mempertanggung jawabkan dikemudian hari.

#### 10. Keterangan Tersangka

MUH IBAL bin SALAHUDDIN, Lhir di Makassar, tanggal 29 september tahun 2011, umur 14 Tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SMP Kelas 2 SMP/ pelajar, pekerjaan, pelajar , suku Makasssar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jlan Tinumbu lrg 2 No. 292 Makassar

##### Menerangkan :

- a. Ia diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- b. Bahwa ia membenarkan dirinya telah tertangkap pada hari sabtu tanggal 02 Aprilk 2016 sekitar jam
- c. Bahwa ia juga membenarkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya ditemukan dua saset elastik bening narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam bungkus saset plastik kosong yang ia simpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang ia pake pada saat tertangkap
- d. Bahwa ia juga membenarkan jiks sabu-sabu tersebut diperoleh dari lk RIJAL (DPO) didalam rumahnya
- e. Ia juga membenarkan jika sebelum ia menerima kedua paket sabu-sabu tersebut dari lk RIJAL ia melihat ibunya



menyerahkanshabu-shabu kepada lk RIJAL (DPO) pergi  
mengantar barang ke daerah terowongan fajar

- f. Bahwa ia mengetahui jika memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu adalah perbuatan melawan hukum dan ia tidak memiliki ijin dalam hal tersebut
- g. Menyesali terhadap semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
- h. Bahwa keterangan yang diberikannya adalah sudah keterangan yang sebenarnya dan bersedia mempertanggung jawabkan dikemudian hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan hukum pidana terhadap anak yang memakai narkoba dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba menurut undang-undang No 35 Tahun 2009 terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa terhadap tindak pidana narkotika yaitu terdakwa Muh Ikbal Bin Syaharuddin dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja di lembaga yang ditunjuk Departemen Sosial Selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan dari sisi penerapan hukum pidana anak yang terlibat dalam kasus narkoba maka bentuknya adalah sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat 3 yang antara lain upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labilisasi , pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, baik sisi mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Pelaksanaan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari amar putusan yang telah diputuskan oleh hakim tentang kasus anak yang terjerat narkoba yaitu pemakai dan pengedar dengan perkara pidana No. 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks., hakim telah memutuskan dengan saksi yang setimpal terhadap terdakwa. berdasarkan kasus tersebut, maka hal ini sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 ayat 1 yaitu “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit sebesar 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara secara materil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun secara formil dalam proses persidangan perkara ini, ada kekurangan dari jaksa penuntut umum dan hakim yaitu belum menerapkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 dalam proses beracara di Pengadilan, padahal undang-undang ini sudah berlaku. dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum dan hakim kurang progres dalam menerapkan undang-undang yang sesuai dengan posisi perkara.

## B. Implikasi

Bertolak dari kesimpulan diatas maka penulis merumuskan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagi Hakim dalam mempertimbangkan kembali dalam memberikan putusan terhadap kasus anak yang terlibat narkoba sebagai pemakai dan pengedar, dikarenakan dalam persidangan peradilan anak masih seringkali tidak sesuai penerapan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan anak.
2. Bagi keluarga dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada terdakwa untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memperbaiki diri untuk lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.

Pramuka SakaBhayangkara, *Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Bina Darma Pemuda, 1997.

Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta, 2004.

M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*.

Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Aneka cipta. Jakarta.

Umar Said Sugiarto, ‘*Pengantar Hukum Indonesia*’ (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)  
Wagiatosoetodjo, *Hukum pidana Anak*. PT Refika Aditama. 2016.

Muhammad Abdul Tausikal, “*Tentang Narkoba dalam Pandangan Islam*.”  
Jogjakarta.

Wagiatosoeto, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama. Jakarta.

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mansur, Didik M Arif dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008.

Siregar, Bisman. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta; Sinar Grafika. 2000.

Suparman Nyompa, *Hakim Pengadilan Negeri Makassar*, Wawancara, Makassar, 12 desember 2016.

Kementerian Agama RI., *Al – Quran dan Terjemahannya* ( Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Kementerian Agama RI., Al – Quran dan Terjemahannya ( Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Kementerian Agama RI., Al – Quran dan Terjemahannya ( Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum ( Jakarta: 1998 )

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 103.

#### **Website:**

Kurniawan“KebijakanHukumpidanaterhadapAnak”<http://kurniawanlawfirm.blogspot.co.id/2012/02/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-anak.html>(diakses 15 Juli 2016, 14 :05 WITA )

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/28/325186/jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen> (diakses 15 juli 2016- 18 : 05 WITA)

<https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>(14juni 2016 14.50 WITA)

Pengadilan Negeri Makassar, “Tugas pokok dan fungsi” *Situs Resmi* PN Mks <http://pn.mks.go.id/index.php?page=tupoksi.html> (08maret 2017).

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar (PN. KELAS 1A MAKASSAR), “ Visi dan Misi”, *Situs Resmi PN Makassar*.[http://www.pn-makassar.go.id/Visi\\_Misi.html](http://www.pn-makassar.go.id/Visi_Misi.html) ( 18maret 2017)

Wikipedia, 2010”Narkoba” (Online) ([http:// id.wikipedia.org/wiki/Narkoba](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba). Diakses tanggal 21 Juni 2017, pukul 10:19)

BNK Samarinda. 2007 “Faktor dan Akibat Narkoba “ (online), ([http://bnk.samarinda.go.id/index.php?q=faktor –akibat-narkoba](http://bnk.samarinda.go.id/index.php?q=faktor-akibat-narkoba), diakses tanggal 12 Juni 2017, pukul 11 : 47

**Peraturan Perundang-undangan :**

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1994 Tentang *Pemeriksaan Perkara di Muka Sidang*.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika* Pasal 1 Angka 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang No, 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*.

Republik Indonesia, Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia* Pasal 1 Angka 5.

Republik Indonesia, Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 Angka 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang No, 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia, No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Republik Indonesia, No 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan

**PERMOHONAN PENANDATANGANAN IJAZAH STRATA SATU (SATU)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

1. Nama : Ari Wahyudi Achmad
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 29-011-1994
4. Alamat : Perumahan Permata Sudiang Raya BPS 3 Blok F4 No. 4
5. Desa/Kelurahan : Biringkanaya
6. Kecamatan : Sudiang
7. Kota : Makassar
8. Provinsi : Sulawesi Selatan
9. Tanggal Masuk : 01 September 2013
10. Tanggal Keluar : 26 Juli 2017
11. Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Syari'ah dan Hukum
12. IPK : 3,35
13. Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai Dan  
Menedarkan Narkoba (Putusan 114/PidSus-Anak/2016/PNMks)
14. Tanggal Pengajuan Penandatanganan Ijazah:
15. No. Seri Ijazah/Reg. Fakultas :


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Samata, 7 Agustus 2017

Wakil Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum

Yang bersangkutan

  
Dr. H. Abd. Halim Talhi, M.Ag  
NIP. 197110201997031002

  
Ari Wahyudi Achmad  
NIM. 10500113175



# SURAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal : permohonan judul skripsi  
Kepada Yth,  
Ketua Jurusan/Program Studi  
Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Di

Samata Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Wahyudi Achmad

NIM : 10500113175

Semester/Klpk: 6 (enam)/D

Angkatan : 2013


Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan korban anak yang masih dibawah umur.
2. Perlindungan Hukum terhadap anak yang masih dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur.
3. Penerapan Hukum pidana terhadap ~~anak-anak~~ yang mengedarkan Narkoba ~~sekaligus~~ <sup>dan memakai</sup> ~~pengonsumsi~~ Narkoba ~~di kalangan anak dibawah umur.~~ <sup>studi p<sup>h</sup>usan</sup> Makassar.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu alaikum Wr. Wb


Mengetahui,

Penasehat Akademik

  
(Dr. Muh. Subir, M.A.)

Makassar, 24 mei 2016

pemohon,

  
(ARI WAHYUDI ACHMAD)

9/6/2016



**RAHMAN SYAMSUDDIN**  
NIP 19821207 200901 1 010

PERLINDUNGAN  
ANAK YANG  
MELAKUKAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
SESAMA ANAK  
DIBAWAH UMUR.

JUDUL SKRIPSI :  
PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK YANG  
MASIH DI BAWAH UMUR  
SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASA SEKSUAL  
SESAMA ANAK DI BAWAH  
UMUR

RUMUSAN MASALAH :

1. BAGAIMANA  
PROSES  
PENGADILAN  
DALAM  
MENGADILI  
ANAK YANG  
DIBAWAH UMUR  
YANG  
MELAKUKAN  
PENGEDARAN  
NARKOBA  
SEKALIGUS  
PENGKOMSUMSI  
NARKOBA

2. BAGAIMANA  
PENERAPAN  
HUKUM PIDANA  
TERHADAP  
ANAK YANG  
DIBAWAH UMUR  
YANG SEBAGAI  
PENGEDAR  
NARKOBA  
SEKALIGUS  
PENGKOMSUMSI  
NARKOBA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR

RAHMAN SYAMSUDDIN  
NIP 19821207 200901 1 010

**SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK**

Nomor : SI. 3/PP.00.9/2606/2016

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H.Muh.Saleh Ridwan, M.A.g  
Nip : 19640601 199303 1 003  
Pangkat/ Gol/Ruang : Pembina Tk.I/IV b/ Lektor Kepala  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama  
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Wahyudi Achmad  
NIM : 10500113175  
Jurusan/ Program : Ilmu Hukum / Strata Satu (S1)  
Semester : VII (Tujuh)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 29 November 1994  
Alamat : Permata Sudiang Raya. BPS 3 blok F4 No.4  
No. HP : 082339318960

Benar yang bersangkutan adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2016-2017 yang BERKELAKUAN BAIK selama menjalani masa studinya

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samata, 7 Desember 2016

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  
Dan Kerjasama



Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan. M.Ag  
NIP.19640601 199303 1 003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**Nomor : 569 Tahun 2016**

**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI**

**TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar  
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar  
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Ahkam Jayadi, SH.,MH  
2. Ashabul Kahfi, S.Ag.,MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : **Ari Wahyudi Achmad**

N I M : 10500113175

Fakultas/Jurusan : **Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **"Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Mengedarkan dan Memakai Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)"**

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;  
c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016  
d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

pada tanggal : 10 November 2016



**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag**

NIP. 19621016 199003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 SamataSungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.91/2016  
Lamp : 1 (satu) exemplar  
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Samata, 5 September 2016

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Di-  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswi UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Ari Wahyudi Achmad  
N I M : 10500113175  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmue Hukum  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Permata Sudiang Raya BPS 3 Blok F4

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

**“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Mengedarkan dan Memakai Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar)”**

Dengan dosen pembimbing:

1. Ahkam Jayadi., SH. MH
2. Ashabul Kahfi., S.Ag. MH

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian Di Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2016 s/d 16 Desember 2016

Demikian harapan kami dan terima kasih.  
*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb*



**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.**

Nip. 19621016 199003 1 003



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) EMAIL : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

MAKASSAR 90111

Makassar, 30 Nopember 2016

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 353 /HKM/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

**BASO RASYID, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :


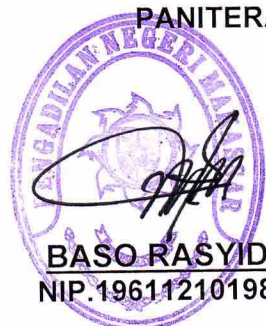
Nama : **ARI WAHYUDI ACHMAD**  
NIM : 10500113175  
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Alamat : Permata Sudiang Raya BPS 3 Blok F4 Makassar  
Judul Penelitian : **“PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEDARKAN DAN MEMAKAI NARKOBA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)”**.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016, dan telah dibimbing oleh :

1. **SUPARMAN NYOMPA, SH.,MH**

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 05 September 2016 Nomor : SI.1/PP.00.9/2161/2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA   
  
**BASO RASYID, SH.MH**  
NIP.196112101982031007



**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 544 Tahun 2017

**T E N T A N G**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI  
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
N a m a : Ari Wahyudi Achmad  
N I M : 10500113175  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai  
Mengedarkan Narkoba"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Istiqamah, M.H  
Penguji I : Dr. Marilang, M.H  
Penguji : Dr. M. Thahir Maloko, M, H.I  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 19 Mei 2017

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembususan

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa:





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**Nomor : 30 / Tahun 2017**  
**T E N T A N G**  
**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 24 Maret 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 24 Maret 2017  
Dekan :

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor 343 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan :  
N a m a : Ari Wahyudi Achmad  
N I M: : 10500113175  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2017  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : "Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

**Ketua** : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
**Sekretaris** : Istiqamah, S.H, M.H  
**Penguji I** : Dr. Marilang, M.Hum  
**Penguji II** : Dr. M. Thahir Maloko, M.H I.  
**Pelaksana** : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid

**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditandatangani di : Samata  
Pada tanggal : 19 Juli 2017  
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN  
DRAFT SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEDARKAN DAN  
MEMAKAI NARKOBA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar)**

Disusun dan diajukan Oleh :  
**ARI WAHYUDI ACHMAD**  
**NIM: 10500113175**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan  
penulisan skripsi  
Pada tanggal : 14 November 2016

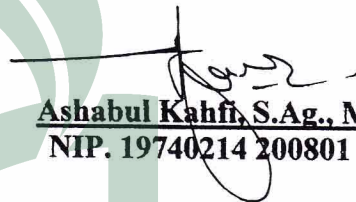
**DOSEN PEMBIMBING**

Pembimbing I



**Ahkam Jayadi, SH.,MH**  
**NIP. 19611024 198703 1 003**

Pembimbing II




**Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H**  
**NIP. 19740214 200801 1 009**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



**Istiqamah, SH. MH**  
**NIP. 196801120 199503 2 001**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

  
**Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag**  
**NIP.19621016 199003 1 003**












## DAFTAR HADIR UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Ari Wahyudi Achmad

NIM : 10500113175

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Sekretaris	2. 
3.	Ahkam Jayadi, S.H, M.H	Pembimbing	3. 
4.	Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H	Pembimbing	4. 
5.	Dr. Marilang, M.Hum	Penguji	5. 
6.	Dr. M. Thahir Matoko, M.H.I.	Penguji	6. 
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7. 
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8. 
9.	Ari Wahyudi Achmad	Mahasiswa	9. 

Samata, 26 Juli 2017

Ketua Panitia

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP 19621016 199003 1 003

## RIWAYAT HIDUP



**Ari Wahyudi Achmad** lahir pada tanggal 29 November 1994 di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, Penyusun merupakan anak dari pasangan suami istri Achmad Mucharom dan Syamsunah Syam. Jenjang pendidikan yang ditempuh, mulai dari Sekolah

Dasar Negeri Tamasongo Takalar yang bertempat di Jl. Kammi Takalar tapi hanya sampe kelas satu, di tahun ajaran kedua penyusun melanjutkan pendidikan Sdnya di kota Timika Papua yaitu Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Timika Islam (YAPIS) prestasi yang pernah diraih yaitu mengikuti turnamen Bandung Karate Club (BKC) tingkat SD di Jawa Barat pondok Bandung dalam rangka pengambilan sabuk hijau dan lulus pada tahun ajaran 2007, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama, SMP Negeri 7 Timika Papua tapi hanya sampe kelas satu, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 36 Makassar dan lulus pada tahun 2010 penyusun melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat menengah atas di SMA Negeri 22 Makassar yang mana merupakan sekolah Atlit dan Umum adapun prestasi yang diraih pada saat itu terpilih menjadi Purna Paskibraka Indonesia di Tingkat Kota Makassar pada tahun 2011. dan menyelesaikan sekolahnya pada tahun ajaran 2013. setelah lulus, penyusun mengambil jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi pada tahun 2013 dengan jalur Mandiri Pada Universitas Islam Negeri Makassar Sulawesi Selatan dan berhasil lulus pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum sesuai dengan harapan penyusun.